

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gelombang Islam konservatif di Indonesia belakangan ini kembali menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Sekalipun gelombang Islam konservatif dianggap sebagai hal positif yang dapat meningkatkan kesalehan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah Ilahiah. Namun, kemunculan gelombang ini lebih sering dinilai sebagai ancaman bagi keragaman serta kerukunan antar umat beragama. Sifat eksklusif dan tekstualis yang dipatuhi oleh kelompok ini seringkali menimbulkan gesekan di dalam masyarakat majemuk seperti yang terjadi di Indonesia.

Dalam perkembangannya, gelombang Islam konservatif di Indonesia telah masuk ke semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada awalnya fenomena ini sering dianggap hanya bersifat ideologis dan keagamaan. Namun anggapan tersebut terbukti keliru karena terdapat kajian telah menemukan bahwa kelompok ini telah menunjukkan eksistensinya dibidang politik, ekonomi, pendidikan dan di ruang publik lainnya. Menurut jajak pendapat yang dipublikasikan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura konservatisme sedang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai contoh sekitar 82% penduduk Indonesia mendukung

anggapan bahwa perempuan harus berhijab sebagai bagian dari penerapan hukum Islam. Survey tersebut melibatkan 1.620 responden di 34 provinsi (dw.com, 2017).

Hasil survei yang sama juga menunjukkan hanya 9% responden yang menilai bahwa penerapan hukum Islam tidak akan memberi dampak positif yang signifikan. Sebaliknya 67% menganggap penerapan Syariah Islam akan mampu menjaga tenun moral masyarakat. Hasil survei ini sejalan dengan temuan bahwa sejak Reformasi Tahun 1998 hingga tahun 2013 yang melahirkan desentralisasi telah menghasilkan 440 Peraturan Daerah Syariah yang dibentuk berdasarkan hukum Islam. Namun, saat yang bersamaan sebagian besar responden menilai ancaman terbesar terhadap Islam tidak berasal dari luar, melainkan dari umat Muslim sendiri. Terutama keterlibatan tokoh agama di panggung politik dianggap bisa melukai integritas Islam (dw.com, 2017).

Hasil riset di media sosial terhadap lima spektrum paham keagamaan yakni liberalisme, moderatisme, konservatisme, Islamisme, dan radikalisme atau ekstremis juga ditemukan bahwa di media sosial khususnya Twitter narasi-narasi yang ditemukan didominasi oleh narasi yang cenderung konservatif dengan angka mencapai 67,2 persen. Sedangkan paham keagamaan moderat sebanyak 22,2 persen, liberal, 6,1 persen, dan Islamis hanya berkisar 4,5 persen. Riset yang sama juga menemukan bahwa kelompok moderat di twitter sangat terbuka. Sedangkan kelompok

liberal dan Islamis sangat jarang berdialog, dan hal ini mempersulit terbukanya peluang terciptanya proses pertukaran antar pemahaman (nu.or.id, 2020). Berdasarkan hasil riset PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) menunjukkan bahwa di ruang publik digital narasi keberagaman konservatif masih mendominasi. Data penelitian menyebutkan angka 46,3% narasi konservatisme agama ada di siaran televisi, sementara narasi moderasi Islam ada di angka 33,4%, narasi Islam liberal 0,6%, narasi Islamis 0,4%, dan narasi tentang Islam radikal ada di angka 0,1% (cnnindonesia.com, 2021).

Meningkatnya jumlah kelompok Islam baru pasca reformasi, yaitu Islam garis keras dan Islam konservatif juga berkontribusi pada menguatnya konservatisme agama di Indonesia. Penyebab lain adalah pertumbuhan kegairahan keagamaan seiring pertumbuhan ekonomi kelas menengah Muslim dan peningkatan konservatisme keagamaan di berbagai belahan dunia. Merespons fenomena ini, aktor-aktor politik menyesuaikan diri dengan kelompok konservatif untuk mendulang suara dalam pemilihan umum (pemilu). Pada gilirannya, kelompok konservatif menjadi lebih aktif dalam rangka mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok mereka sendiri (theconversation.com, 2020).

Selain itu juga ditemukan beberapa alasan mengapa gelombang konservatif kembali tumbuh subur di Indonesia. Alasan

pertama adalah hubungan antara demokratisasi dan memudarnya pengaruh pandangan-pandangan keislaman yang akedemis, liberal dan progressif. Artinya, argumen ini menjadi penegas bahwa mayoritas umat Islam Indonesia pada dasarnya konservatif atau cenderung mempunyai corak fundamentalis. *Kedua*, menguatnya pengaruh ideologi Wahabi dari Timur Tengah yang sangat konservatif dan cenderung literal, tekstual, skriptural dan berwawasan keagamaan yang sempit dan kaku (Bruinessen, 2013). Alumni perguruan tinggi di Timur Tengah, terutama Saudi Arabia, ikut menyebarkan corak pemahaman keislaman yang *harfiah* dan skripturalis kepada masyarakat Indonesia dengan cara mendakwahkan logika-logika aneh yang sesungguhnya berasal dari kepercayaan dan tradisi Yahudi serta tradisi dari Kristen Ortodoks (aceh.tribunnews.com, 2018).

Pasca reformasi, gelombang Islam konservatif di Indonesia seakan menemukan momentumnya, dapat bernafas lega sebab memiliki sebuah kebebasan serta tempat dalam mengekspresikan agenda-agendanya (Ricklefs, 2012; Karim, Mamat and Possumah, 2014; Arifianto, 2019). Salah satu hal yang menjadi tanda adalah adanya beragam penolakan serta perlawanan dari kelompok *non-mainstream* terhadap ide-ide serta pemahaman tentang moderasi Islam yang lebih progresif dari dominasi kelompok *mainstream* seperti Muhammadiyah dan NU.

Bahkan, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mulai menunjukkan pola keberagamaan yang lebih konservatif dalam beberapa dekade terakhir ini terkait dengan kebijakan dan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya (van Bruinessen, 2011; 2013). Sebagai contoh, pada tahun 2005 misalnya, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman paham sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme sebab beberapa paham ini dipandang MUI tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Fatwa konservatif MUI lainnya adalah fatwa tentang keharaman praktik doa bersama atau doa antar-agama, fatwa mengenai keharaman melangsungkan pernikahan beda agama, fatwa soal kesesatan kelompok Ahmadiyah, fatwa bahwa Ahok atau Basuki Cahaya Purnama adalah pelaku penista agama, dan sederet fatwa-fatwa kesesatan serta keharaman lainnya. Beberapa Fatwa MUI tersebut kemudian di amini sekaligus menjadi rujukan inspirasi bagi sebagian kelompok Islam konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta ormas-ormas Islam radikal lainnya (Lindsey, 2016).

Meningkatnya intoleransi dan konflik agama di Indonesia telah memicu perdebatan ilmiah tentang peran agama, terutama Islam, di negara modern yang sebagian besar sekuler (Hamayotsu, 2014). Ruang publik tidak hanya arena kontestasi antara kelompok Islamis dan sekuler, melainkan juga terjadi antara sesama eksponen gerakan yang memobilisasi Islam sebagai sumber legitimasi

(Ansor, 2016) dan salah satunya adalah Aksi Bela Islam 212. Aksi ini adalah salah satu bentuk dari aktivisme "Islam daring" atau "Islamic clicktivism" yang secara konsisten mengambil peran dalam kontestasi identitas politik kaitannya dengan otoritas propaganda keagamaan konservatif yang merambah hingga di ruang publik (Nurish, 2016); Ahyar, 2019).

Kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah satu contoh bahwa intoleransi dan fanatisme agama dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik sosial dan politik, termasuk manifestasi kekerasan teroris, kekerasan simbol 'symbolic violence' (Sarhindi, 2017) serta tanda bagi tumbuh bangkitnya fenomena populisme Islamis di Indonesia (Setijadi, 2017). Kasus Ahok menjadi bukti bagaimana agama secara langsung dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik (Buczynski, 2020). Dalam kacamata politik, peristiwa yang menimpa Ahok adalah sebuah bentuk nyata dari kriminalisasi tentang makna kebebasan berekspresi di ruang publik juga tentang percakapan antara dunia politik dengan agama. Undang-undang Penodaan Agama, yang hanya memuat empat pasal ringkas, melarang siapa pun untuk "secara sengaja membicarakan, merekomendasikan, atau memberikan dukungan kepada tafsir suatu agama yang menyimpang dari ajaran pokok agama itu sendiri (Fenton, 2016); (Fealy, 2016). Pengesahan Mahkamah Konstitusi atas undang-undang ini membantu mengubah Indonesia menjadi

negara yang sangat religius sekaligus membuka jalan bagi keterlibatan langsung keberadaan Islam konservatif di ranah ruang publik (Bourchier, 2019).

Selain itu, keputusan yang diambil oleh pengadilan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan opini publik dari pada otoritas aturan hukum, hak-hak minoritas terlalu sering bergantung pada dukungan mayoritas dari pada kewarganegaraan, dan aktor yang tidak terpilih seperti MUI menjadi lebih kuat dari pada otoritas pejabat yang terpilih secara politik (Menchik, 2019). Otoritas keagamaan MUI memperoleh kekuatan dan kekuasaan *de facto* yang signifikan sebagai setara dengan pasukan "polisi agama" informal. Taktik serupa digunakan dalam rangka membatasi gerakan serta kelompok keagamaan yang dipandang telah sesat sebagaimana yang telah menimpa kelompok minoritas Ahmadiyah. Tindakan dan kebijakan negara pun mengikuti, atau disertai dengan ancaman dan kecaman oleh pihak MUI dan atau organisasi Islam konservatif lainnya dan kemudian terjadilah tindak kekerasan, biasanya dipimpin oleh kelompok-kelompok militan Islam yang kebal hukum atau menolak untuk dihukum oleh negara (Lindsey, 2016).

Kelompok gerakan Islam konservatif mendorong Islamisasi masyarakat Indonesia dengan mendukung terciptanya sebuah aturan hukum yang sejalan dengan interpretasi mereka terhadap teks al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pada konteks ini, gerakan

konservatif dalam bahasan Eunsook Jung mendorong pandangan dunia yang tertutup dan berbasis pada tafsir Islam yang sempit sekaligus rigid. Namun, gerakan konservatif ini ternyata mampu memobilisasi massa atau para pengikutnya dengan menggunakan berbagai argumen atas nama agama dan moralitas. Gerakan ini aktif menggunakan dan memanfaatkan *framing* mengenai persoalan degradasi moral, sebagai strategi protes sosial terhadap berbagai macam kebijakan yang datang dari pemerintah. Dalam praktiknya, gerakan konservatif ini tidak tunggal melainkan jamak. Keberadannya diikat oleh kesamaan pandangan melalui suara yang tidak jauh berbeda seperti permasalahan Undang-Undang Anti Pornografi, Penegakan dan Penerapan Syariat Islam di daerah, anti perselingkuhan dan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), aturan terkait anti terhadap keberadaan kelompok Ahmadiyah (Eunsook Jung, 2020, 105–127). Tuduhan sesat yang dialamatkan kepada Ahmadiyah menunjukkan adanya kontestasi yang berlangsung antara otoritas agama dengan otoritas negara serta memberikan signal bagi menguatnya kembali kelompok-kelompok Islam konservatif di Indonesia (Jacqueline Hicks, 2014).

Marcus Mietzner menyatakan bahwa fenomena konservatisme dan gerakan populisme Islam di Indonesia yang semakin menguat dapat menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan tatanan kehidupan demokrasi yang sudah mapan (Marcus Mietzner, 2018). Misal, ditahun 2016 telah tercatat ada

lima kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama (A. Fenton dan D. Price, 2016). Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfan Abubakar menanggapi fenomena di atas dengan memberikan saran kepada pihak pemerintah untuk lebih berperan aktif dalam menghambat laju perkembangan konservatisme agama di Indonesia sebab keberadaannya dapat menjadi bibit bagi tumbuhnya intoleransi dan kekerasan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan terus menggelorakan semangat dan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, khususnya ditujukan kepada kalangan generasi muda atau generasi milenial yang lebih rentan terdampak paham keberagaman yang konservatif (mediaindonesia.com).

Menyoal tentang ideologi tidak dapat di hadapi melalui sistem dan kebijakan demokrasi yang mengakomodasi. Tidak juga dapat diselesaikan dengan menghentikan, melarang, dan atau membubarkan organisasi seperti pada ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini tidak saja dapat menciderai demokrasi itu sendiri melainkan juga akan semakin menguatkan lahirnya kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Soal ideologi adalah soal “perebutan dan perang narasi” yang bisa saja terjadi melalui minimal empat ruang utama, yakni *Pertama*, tempat ibadah (masjid, wihara, gereja), *kedua*, arena bisnis seperti kafe dan sebagainya. *Ketiga*, lembaga pendidikan baik formal (Kampus,

sekolah) maupun *non-formal* (pesantren, majelis ta'lim), dan *keempat*, ruang media sosial seperti: Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, dan lain-lain). Menghadapi persoalan ideologi dengan menguatnya gelombang Islam konservatif di empat ruang "pertempuran narasi" ini tentunya tidak dapat diabaikan.

Dalam pandangan Carool Kersten (2015), ada gairah atau "vibrant" terkait pemikiran intelektual Islam di Indonesia dengan munculnya beragam tokoh atau figur serta lembaga keislaman yang moderat dan progresif. Meskipun di sisi lain terdapat juga tokoh atau figur serta lembaga tertentu di Indonesia yang memunculkan ide gagasan pemikiran Islam yang "kontra-wacana" berupa "gelombang konservatif" atau "*conservative turn*" (Martin Van Bruinessen, 2013).

Diantara pemikir muslim moderat yang menarasikan pemikiran moderasi Islam di Indonesia adalah Azyumardi Azra (2003), sosok yang menggambarkan bentuk wajah Islam moderat di Indonesia sebagai Islam yang penuh kedamaian dan moderat (*Islam with a smiling face*), dalam narasi Abdurrahman Wahid (2006) berupa wacana "pribumisasi Islam" atau Islam moderat yang didasarkan atas kekhasan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Dalam bahasa Syafi'i Maarif (2009) digambarkan sebagai keberislaman khusus dalam bingkai keindonesiaan, yang menjalin adanya kesesuaian ajaran agama dengan konteks sosio kultur masyarakat pribumi.

Adapun lembaga keislaman di Indonesia yang menjadi pengusung moderasi Islam antara lain adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah tetap berijtihad untuk menyemaikan gagasan Moderasi Islam tumbuh subur di Indonesia, sebuah keberislaman yang tidak berada pada posisi liberal atau ultra-liberal maupun fasisme kiri, komunisme. Muhammadiyah mendorong moderasi Islam karena Indonesia memiliki kultur Islam yang tidak sama dengan Islam di Timur Tengah. Islam Indonesia lebih berkarakteristik *washatiyah*-tengahan, tidak ke kanan atau pun ke kiri (Qodir, (B) 2019). Muhammadiyah dipandang sebagai organisasi Islam moderat dan progresif, menjadi sarana guna menyebarkan pesan tertentu dan bukan sebagai sebuah partai politik. Meskipun demikian, Muhammadiyah akan tetap menjadi bagian penting dari politik Indonesia selama dia dapat memainkan perannya secara strategis dan responsif (Haedar Nashir, dkk., 2019). Demikian halnya dengan NU yang mentahbiskan dirinya sebagai organisasi yang mempromosikan Islam moderat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adalah*), moderasi (*al-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dan toleransi (*at-tasammuh*), (Abd. Halim, 2014).

Studi tentang gelombang Islam konservatif di Indonesia sejauh ini memiliki empat kecenderungan utama. *Pertama*, ideologis-politis, yakni literatur yang melihat konservatisme melalui jejaring atau sel-sel terorisme Islam di Indonesia (Jones,

2016, 2017; Charlotte Setijadi, 2017; Chernov Hwang, 2017), sebagai hasil dari anak keturunan politik transnasional dari Timur Tengah (Ahmad Najib Burhani, 2017; Alexander Arifianto, 2019). Sementara dalam perspektif agama, keinginan kuat dalam rangka menegakkan syari'at Islam dan merasa dikucilkan dari istana kekuasaan pemerintahan menjadi pemicu bagi lahir berkembangnya Islam Konservatif di Indonesia (Alex. P. Schmid, 2017; Marcus Mietzner & Burhanuddin Muhtadi, 2018), sebuah paham fundamentalisme dan gelombang Islam konservatif yang dinilai dapat membawa preseden buruk bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa yang harmonis dan demokratis (Amin Maghfuri, 2019). *Kedua*, aspek agama skripturalistik atau tekstualis, eksklusif, rigid, serta intoleran (Hamayotsu, 2014; Ahmad Abrori, 2017; Azyumardi Azra, 2019). *Ketiga*, fundamentalis, radikal-ekstrim, terorisme (Emna Laisa, 2014; Jones, 2016; (Hwang, 2017). *Keempat*, dalam perspektif pendidikan. Pendapat lain mengatakan penyebab kebangkitan Islam konservatif bukan semata-mata karena pernyataan kontroversial yang datang dari kelompok Islam liberal, melainkan bersumber melalui instansi atau lembaga pendidikan Islam (Ahmad Abrori; 2017), (Miftahul Jannah; 2019). Dari keempat kecenderungan ini belum ada yang membahas persoalan gelombang Islam konservatif dari analisa sosial-politik dalam bingkai konsep besar moderasi Islam dan membahasnya terkait

dengan keberadaan otoritas serta respons dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap kelompok Islam konservatif.

Penelitian ini sendiri dapat dikatakan menarik sekaligus ilmiah, sebab *pertama*, perang gagasan atau "ghazw al-fikr" atau "invasi intelektual" dalam pemikiran Islam di Indonesia terutama terkait persoalan gelombang Islam konservatif vis-a-vis moderasi Islam akan terus berlanjut di masa depan. Maka tidak salah jika *Antropolog-cum-Indonesianis-Islamisis* John Bowen (2003) pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah situs utama untuk mengkaji keragaman sosial, gagasan politik, dan komitmen keagamaan.

Kedua, berbagai aksi kekerasan atau radikalisme Islam mengejutkan banyak pihak karena melibatkan masyarakat yang notabene-nya berasal dari pedesaan terutama di Jawa (Muhammad Wildan, 2013) termasuk juga di Kebumen. Keberadaan gelombang Islam konservatif di Kebumen sendiri tampak ketika pada 09 Mei 2013 Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menyergap tujuh terduga teroris di Dusun Kembaran, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Bahkan terjadi baku tembak dalam aksi penyergapan tersebut (nasional.tempo.com., 2013). Pada 20 Juni 2018 kelompok teroris yang terafiliasi dengan ISIS ini memiliki agenda melakukan aksi penyerangan di Polres Kebumen (news.okezone.com, 2018). Menanggapi hal ini pada tahun 2019 Kepolisian Resor Kebumen mengintensifkan program

deradikalisasi di kalangan usia muda atau generasi era millennial (Gatra.com, 2019).

Yazid Abdul Qadir Jawwas salah satu tokoh pergerakan Islam Salafi, alumni dari al-Haramain, al-Sofwa, dan eks. DDII serta Masyumi yang berasal dari Kebumen juga mendapatkan tempat tersendiri sebagai pemangku otoritas keagamaan yang dikagumi oleh masyarakat pedesaan terutama di daerah Sampang, Sempor, Kebumen meskipun dia sendiri sebenarnya tidak tinggal atau menetap di wilayah Kebumen (Wawancara Eko Setiyo Budi Ketua PCM Sempor Kebumen, 05 April 2022). Asumsi penulis, gerakan Islam konservatif telah menyasar ke daerah-daerah pedesaan sebagai panggung untuk menyebarkan ideologi. Mereka tumbuh subur melalui media pendidikan, pengajian, internet, media sosial, dan lainnya. Kawasan pedesaan dan atau daerah pinggiran merupakan pilihan tempat atau sarang yang nyaman bagi kelompok Islam konservatif untuk mengembangkan sayap ideologi mereka sebab keberadaannya jauh dari sorotan publik, media, dan pengawasan dari pemerintah. Mereka juga memanfaatkan kelemahan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat pedesaan untuk eksistensinya yang lebih baik, mencoba mendapatkan ruang guna mempengaruhi bahkan merebut kemapanan otoritas keagamaan dari kyai dan ulama yang sebelumnya telah ada.

B. Masalah Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana telah peneliti sebutkan di atas, terdapat permasalahan utama yang menjadi fokus kajian penelitian di dalam disertasi ini, yakni “Mengapa otoritas keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Kebumen dalam meneguhkan moderasi Islam sebagai respons terhadap gelombang Islam konservatif tidak dapat berjalan dengan baik?” Dari pokok permasalahan ini kemudian dirumuskan menjadi tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses gelombang Islam konservatif kembali tumbuh subur di Kabupaten Kebumen baik di wilayah perkotaan maupun di daerah pedesaan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab melemahnya otoritas keagamaan Muhammadiyah dan NU Kebumen di tengah kembalinya gelombang Islam konservatif?
3. Bagaimana bentuk atau model respons Muhammadiyah dan NU Kabupaten Kebumen dalam menghadapi kembalinya gelombang Islam konservatif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkaya khazanah pemikiran politik Islam terutama berkaitan dengan teori otoritas keagamaan dalam kerangka analisa politik, sosial, ekonomi, dan

perkembangan teknologi media sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latarbelakang penyebab tumbuh suburnya kembali gelombang Islam konservatif di Kebumen sehingga dapat diketahui proses sejarah gelombang Islam konservatif di Kebumen
2. Untuk menemukan dan menganalisa secara kritis faktor-faktor utama yang menjadi penyebab melemahnya eksistensi otoritas keagamaan Muhammadiyah dan NU Kebumen ditengah menguatnya kembali arus gelombang Islam konservatif.
3. Untuk menganalisa serta memetakan karakteristik bentuk atau model respons baik dari Muhammadiyah maupun NU Kebumen dalam menghadapi arus gelombang Islam konservatif.
4. Menawarkan konsep keberislaman yang transformatif dalam dua hal, yakni: implikasi teoritik tentang otoritas keagamaan dan solusi alternatif model kebijakan Muhammadiyah dan NU Kebumen dalam merespons keberadaan Islam konservatif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap fakta kesejarahan tentang geneologi Islam konservatif serta jejaringnya di wilayah Kebumen Jawa Tengah.
2. Mengungkap secara mendalam faktor-faktor utama yang menjadi penyebab adanya pergeseran otoritas keagamaan Muhammadiyah dan NU di tengah arus gelombang Islam konservatif.
3. Mengungkap model respons yang diambil oleh Muhammadiyah dan NU Kebumen terhadap keberadaan gelombang Islam konservatif.
4. Memberikan kontribusi keilmuan terhadap pengembangan kajian studi ilmu politik Islam terutama mengenai perkembangan studi pergerakan gelombang Islam konservatif ditinjau dari terori otoritas keagamaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena gelombang Islam konservatif di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai pusat riset disertasi. Kemunculan gelombang tersebut secara langsung maupun tidak telah mempengaruhi eksistensi dari otoritas keagamaan organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya penelitian ini akan mengkaji bagaimana respons Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap gelombang Islam konservatif di Kebumen.

Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021 sampai 2022. Data penelitian akan dibatasi dari Tahun 2017 sampai dengan 2022. Pemilihan tahun tersebut didasari oleh fakta bahwa gelombang Islam konservatif kembali muncul ke permukaan sejak Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Tahun 2016.

F. Sistematika Disertasi

Pembagian bab dan sub bab dibutuhkan dalam penyusunan riset disertasi ini untuk memperoleh sebuah gambaran pemahaman yang terarah, lebih sistematis, dan holistik. Karenanya, dalam riset ini dibagi ke dalam beberapa bab, yakni: Bab *pertama* adalah pendahuluan yang meliputi tentang latarbelakang kegelisahan akademik, rumusan pertanyaan filosofis penelitian, tujuan serta manfaat dari penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika pembahasan, dan terakhir publikasi ilmiah yang relevan dengan riset disertasi ini. Bab *kedua*, merupakan pembahasan *literature review* mengenai definisi dan kategorisasi Islam konservatif, Organisasi Keagamaan dan Konservatisme, moderasi Islam Muhammadiyah dan NU. Bab ini juga akan berisi tentang metodologi penelitian, yang meliputi: Desain penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan yang terakhir adalah teknik analisa data.

Setelah mendapatkan gambaran tentang moderasi Islam dan gelombang Islam konservatif serta format metodologi penelitian

yang baik, maka pembahasan selanjutnya dalam bab *keempat* adalah melakukan pembacaan terhadap data lapangan mengenai dinamika kehidupan keagamaan di Kebumen, yang membahas mengenai kehidupan keagamaan di Kebumen, geneologi Islam konservatif di Kebumen, serta membedah organisasi keagamaan di Kebumen, baik yang moderat maupun yang konservatif. Menginjak bab *kelima* dibahas secara mendalam soal fenomena keberadaan Islam konservatif di Kebumen. Pada bab ini terbagi menjadi lima sub bab pembahasan, yakni: Islam konservatif di Kebumen; simbol, mitos, dan ritual, jejaring dan aktor Islam konservatif di Kebumen, agensi Islam konservatif di Kebumen, faktor-faktor penyebab berkembangnya Islam konservatif di Kebumen, dan Karakteristik Islam Konservatif di Kebumen serta menguatnya otoritas keagamaan mereka.

Riset inti dari disertasi ini dikupas secara mendalam di bab *keenam*, peneliti mencoba memaparkan tentang model atau bentuk respons Muhammadiyah dan NU Kebumen tentang keberadaan Islam konservatif melalui analisa teori otoritas keagamaan. Kajian ini meliputi: Legitimasi Muhammadiyah dan NU dalam isu Islam konservatif, kontestasi dan rekognisi organisasi keagamaan, respons Muhammadiyah dan NU terkait dengan isu keagamaan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, dan Politik. Terakhir adalah melihat bagaimana Muhammadiyah dan NU melakukan branding moderasi Islam sebagai upaya menghadapi eksistensi Islam konservatif di

Kebumen. Bab *ketujuh* adalah bab terakhir, sebuah bab yang menarik kesimpulan atau *natijah* dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian disertasi ini. Bab ini meliputi hasil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, implikasi teoritik penelitian disertasi dengan beberapa teori yang ada, rekomendasi bagi para peminat dan peneliti selanjutnya tentang respons Muhammadiyah dan NU terhadap fenomena gelombang Islam konservatif, membahas keterbatasan di dalam riset disertasi ini, dan kata penutup menjadi bagian paling ujung dari keseluruhan disertasi ini.

Adapun sistematika dalam penyusunan riset disertasi tentang respons Muhammadiyah dan NU terhadap gelombang Islam konservatif di Kebumen Jawa Tengah dapat dilihat secara lebih jelas dan rinci dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sistematika Pembahasan Penelitian

RESPONS MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP GELOMBANG ISLAM KONSERVATIF DI KEBUMEN JAWA TENGAH	
BAB	KETERANGAN
BAB I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah 1.2. Rumusan Masalah Penelitian 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

	1.6. Sistematika Disertasi
BAB II	LITERATURE REVIEW 2.1. Definisi dan Kategorisasi Islam Konservatif 2.2. Organisasi Keagamaan dan Konservatisme 2.3. Gelombang Islam Konservatif di Indonesia 2.4. Moderasi Islam; Muhammadiyah dan NU 2.5. Kerangka Teoritik
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian 3.2. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian 3.3. Teknik Pengumpulan Data 3.4. Purposive Sampling dan Key Informant Penelitian 3.5. Teknik Analisa Data
BAB IV	DINAMIKA KEHIDUPAN BERAGAMA DI KEBUMEN 4.1. Kehidupan Keagamaan di Kebumen 4.2. Geneologi Islam Konservatif di Kebumen 4.3. Gerakan Ormas Islam di Kebumen 4.3.1. Muhammadiyah 4.3.2. NU Nahdlatul Ulama 4.3.3. Ormas Islam Konservatif
BAB V	ISLAM KONSERVATIF DI KEBUMEN 5.1. Islam Konservatif di Kebumen: Simbol, Mitos, dan Ritual 5.2. Jaringan, Aktor, dan Faktor Islam Konservatif di Kebumen 5.3. Agensi Islam Konservatif di Kebumen 5.4. Faktor Berkembangnya Islam di Kebumen 5.5. Karakteristik Islam Konservatif di Kebumen dan Menguatnya Otoritas Keagamaan
BAB VI	RESPONS MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA 6.1. Legitimasi dari Muhammadiyah dan NU dalam Isu Islam Konservatif

	6.2. Rekognisi dan Kontestasi Organisasi Keagamaan 6.3. Respons Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama; Isu Keagamaan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, dan Politik 6.4. Branding Moderasi Islam Muhammadiyah dan NU
BAB VII	KESIMPULAN 1. Kesimpulan Penelitian 2. Implikasi Penelitian 3. Keterbatasan Studi 4. Rekomendasi Penelitian 5. Kata Penutup